

RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN TENGAH TAHUN INDEF 2019
“TANTANGAN INVESTASI DI TENGAH KECAMUK PERANG DAGANG”

Jakarta, 16 Juli 2019

1. Kondisi Perekonomian Global

- **Pertumbuhan ekonomi global melambat.** Prospek ekonomi global belum ada tanda-tanda membaik sejak tertekan tahun lalu. Sumber tekanan dari harga minyak dan rencana normalisasi suku bunga *the Fed* sedikit mereda pada 2019 ini. Sayangnya, peningkatan eskalasi perang dagang masih menjadi ‘batu sandungan’ yang menahan laju perekonomian.
- **Disinflasi global.** Di kelompok pasar negara berkembang (*emerging market*), realisasi inflasi cenderung rendah. Sebagai contoh, inflasi di India hanya 2,5 persen pada 2019:Q1; lebih rendah dari proyeksi lembaga internasional di tingkat inflasi 3,9 persen.
- **Performa neraca transaksi berjalan cukup bervariasi antara negara maju dan negara berkembang.** Beberapa negara yang mengalami defisit neraca transaksi berjalan pada 2019:Q1 diantaranya; AS, Perancis, Inggris, India, Indonesia, dan Filipina. Sementara beberapa negara yang memiliki surplus neraca transaksi berjalan terbesar yaitu; China (US\$58 miliar); Jerman (US\$34 miliar); Singapura (US\$15 miliar) dan Thailand (US\$14,6 miliar).
- **Suku bunga acuan *the Fed* bergerak landai.** Ini sekaligus merefleksikan laju ekonomi AS yang tidak sekuat tahun lalu. Di sisi lain, beberapa bank sentral dunia sudah mulai mengoreksi suku bunga acuannya untuk mendorong sektor riil dan ekspor, seperti Australia (pada 4 Juni lalu menurunkan 25 bps menjadi 1,25 persen); India (6 Juni, 25 bps menjadi 5,75 persen); Malaysia (7 Mei, 25 bps menjadi 3 persen) dan Filipina (Mei, 25 bps menjadi 4,5 persen).
- **Harga komoditas berfluktuasi.** Harga minyak berfluktuasi baik karena masalah permintaan dan penawaran, maupun karena gejolak politik. Akan tetapi, porsi gejolak politik relatif lebih dominan. Beberapa diantaranya adalah sanksi AS kepada Iran dan meminta negara-negara lain untuk menghentikan pembelian minyak Iran. Pada komoditas batu bara, penurunan harga terkait dengan pembatasan konsumsi di India, sejalan dengan ditutupnya operasi pabrik keramik karena isu lingkungan. Isu pembatasan dan penundaan impor batu bara Australia

di pelabuhan China juga memengaruhi harga batubara. Di komoditas minyak sawit, gejolak harga terutama dipengaruhi sentimen dan kampanye negatif dari Uni Eropa terhadap komoditas tersebut. Keterbatasan pergerakan harga minyak sawit, berseberangan dengan harga minyak kedelai yang cenderung naik. Kedua minyak tersebut merajai pasar minyak nabati dunia namun saling mensubstitusi.

2. Kondisi Perekonomian Domestik

- **Kinerja ekonomi Indonesia sepanjang 2019 : Q1 belum sesuai target.** Hanya dua dari beberapa indikator asumsi makroekonomi APBN-2019 yang berada dalam target yaitu inflasi dan nilai tukar. Inflasi sebesar 3,28 persen *yoy* pada Juni, dengan target 3,5 persen pada 2019. Nilai tukar per Juni sekitar Rp14.141; di mana APBN-2019 menetapkan target Rp15.000 per US\$. Pertumbuhan ekonomi 2019 : Q1 hanya 5,07 persen, sementara target di 2019 sebesar 5,3 persen.
- **Koreksi suku bunga acuan dibutuhkan.** Hal ini bertujuan agar ada tambahan stimulus bagi pertumbuhan sektor riil yang belum mencapai target. Selain itu, urgensi penurunan suku bunga acuan juga didasari oleh proyeksi tertahannya kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) sepanjang tahun ini, bahkan ada prospek penurunan FFR pada semester kedua tahun ini. Terlebih lagi rata-rata suku bunga kredit bank umum masih di level 10 persen lebih. Padahal, rata-rata suku bunga kredit di kawasan ASEAN hanya 7 persen.
- **Inflasi masih dalam target APBN-2019, namun meningkat dibandingkan tahun lalu.** Pada Juni 2019 inflasi umum sebesar 3,28 persen (*yoy*); naik dari 3,12 persen (*yoy*) pada Juni 2018. Inflasi inti juga naik, dari 2,72 persen (*yoy*) menjadi 3,25 persen (*yoy*). Inflasi harga barang-barang bergejolak naik dari 4,6 persen (*yoy*) menjadi 4,91 persen (*yoy*).
- **Nilai tukar Rupiah terhadap US\$ cenderung menguat, meski mengalami tekanan pada beberapa perdagangan.** Nilai tukar Rupiah terhadap US\$ sebesar Rp14.141 per US\$ pada Juni 2019. Realisasi tersebut sudah di atas target APBN-2019 sebesar Rp15.000 per US\$.
- **Penerimaan Negara tertekan.** Realisasi penerimaan perpajakan sepanjang Januari-Mei 2019 baru tercapai Rp569 triliun atau sekitar 31,87 persen dari target APBN-2019 (Rp1.786,4 triliun). Meskipun angka tersebut meningkat 5,69 persen

(yoy), namun peningkatan realisasi tersebut masih jauh di bawah peningkatan pencapaian periode yang sama tahun lalu, mencapai 10,4 persen (yoy).

- **Belanja Negara meningkat.** Realisasi belanja pemerintah sepanjang Januari-Mei 2019 tercatat sebesar Rp855,9 triliun atau 34,78 persen dari target realisasi belanja pada APBN 2019. Realisasi tersebut melonjak sekitar 9,8 persen (yoy). Lonjakan tersebut, terutama bersumber dari belanja bantuan sosial.
- **Tekanan terhadap defisit neraca transaksi berjalan masih cukup kuat seiring ketidakpastian akhir perang dagang.** Neraca transaksi berjalan masih defisit hingga US\$6,9 miliar pada 2019:Q1, naik dari US\$5,1 miliar pada 2018:Q1. Defisit neraca transaksi berjalan pada 2019:Q1 ini mencapai 2,6 persen dari PDB.
- **Perkembangan sektor ketenagakerjaan membaik, namun masih dihadapkan pada masalah kualitas tenaga kerja.** Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,32 persen (yoy) sepanjang Februari 2019.

3. Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang

- **Investasi semakin menjauh dari sektor primer dan sekunder.** Pada 2013 porsi investasi asing yang bertandang ke sektor sekunder mencapai 55,4 persen, sedangkan pada 2018 bergeser ke sektor tersier dan porsi investasi di sektor sekunder hanya tinggal 35,3 persen. Hal ini berimplikasi terhadap kemampuan investasi dalam menyerap tenaga kerja dan optimalisasi nilai tambah.
- **Investasi di Indonesia belum efisien.** Nilai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Indonesia untuk 2016-2018 masih berada di angka lebih dari 6. Sangat jauh dari nilai ICOR tahun 2008 yang berada di angka 3,7. Akibatnya, realisasi investasi belum mampu mendorong pertumbuhan sektor industri untuk menjadi *prime mover* ekonomi nasional.
- **Perang dagang berdampak pada peningkatan PDB Indonesia 0,01 persen.** Di sisi lain, perang dagang merugikan AS dan China dimana PDB masing-masing negara terkoreksi 0,1 dan 0,6 persen. Negara yang paling banyak mendulang *cuaca* perang dagang adalah Vietnam dengan pertambahan PDB sebesar 0,52 persen.

- **Perang dagang berdampak pada peningkatan investasi (FDI) Indonesia sebesar 1,02 persen.** Bagi AS dan China, perang dagang menyusutkan investasi mereka masing-masing 3,91 persen dan 2,67 persen. Vietnam mendapatkan *cuana* terbesar dengan peningkatan investasi sebesar 8,05 persen.
- **Perang dagang tidak menguntungkan bagi ekspor Indonesia.** Perang dagang AS-China juga berdampak pada penurunan ekspor 0,24 persen. Hal yang sama juga terjadi di AS dan China dengan penurunan masing-masing sebesar 8,2 persen dan 7,09 persen. Penurunan ekspor AS utamanya disebabkan karena menyusutnya ekspor ke China, demikian juga sebaliknya.
- **Investasi harus didorong untuk meningkatkan ekspor Indonesia.** Hal ini bertujuan agar, baik dalam jangka pendek maupun panjang, menyelamatkan neraca perdagangan Indonesia.
- **Bagi Indonesia, efisiensi birokrasi adalah modal utama untuk meningkatkan kepercayaan asing berinvestasi.** Selain itu, perlu tingkat suku bunga yang kompetitif serta pertumbuhan nilai tambah industri manufaktur juga harus diperhatikan.
- **Upaya perwujudan investasi untuk ekspor perlu dibarengi dengan beragam upaya-upaya penting agar investasi semakin meningkat pada era perang dagang,** melalui: kemudahan akses lahan untuk investor; pembenahan sistem ketenagakerjaan; pembenahan sistem perpajakan untuk usaha dalam negeri; peningkatan iklim investasi melalui persaingan usaha yang sehat; pemberian fasilitas fiskal yang sesuai dengan kebutuhan investor; dan fasilitas dan promosi investasi di dalam dan di luar negeri.
- **Rasio ekspor manufaktur ke PDB Indonesia masih di bawah mayoritas negara Asia Timur, perlu fokus menarik FDI pada sektor manufaktur berorientasi ekspor.** Peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Asia Timur dimotori oleh industri manufaktur berorientasi ekspor. Selain *hard infrastructure*, Indonesia juga perlu akselerasi perbaikan *soft infrastructure* antara lain: perijinan, kemudahan akses lahan untuk investor; revisi sistem ketenagakerjaan; pembenahan sistem perpajakan; persaingan usaha yang sehat; pemberian insentif fiskal yang sesuai dengan kebutuhan investor dan kompetitif di kawasan; serta promosi investasi di dalam dan di luar negeri.

--0--